

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir tidak ada negara yang bebas dari masalah kemiskinan bahkan negara maju sekalipun. Kemiskinan menjadi fokus utama di beberapa negara baik negara maju maupun negara berkembang (globalissues.org). Kemiskinan merupakan masalah umum dan menyebabkan banyak kerugian seperti terjadinya ketimpangan pendapatan, kejahatan dan distorsi. Selain itu mendorong terjadinya kerusakan, pengangguran dan sebagainya.

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi standar hidupnya. Tidak terpenuhinya standar hidup berarti tidak terpenuhinya kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Ada delapan bidang yang dapat menginterpretasikan standar hidup. Delapan bidang tersebut menurut BPS mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya.

Selain dilihat dari tidak terpenuhinya standar hidup, kemiskinan dapat dilihat dari pendapatan yang diterima seseorang. Menurut BPS, individu yang pendapatan dibawah Rp 401.220,- per bulan dikatakan miskin. Namun, *World Bank* menentukan batas kemiskinan individu jika pendapatan yang diterima yaitu \$1,9 per hari (ika menggunakan kurs \$1 = Rp 14.500 (tahun 2018) maka total pendapatannya Rp 826.500,- per bulan) sehingga individu yang mempunyai pendapatan di bawah Rp 826.500,- dikatakan miskin.

Kemiskinan tergolong sebagai permasalahan. Permasalahan makro merupakan permasalahan yang berdampak luas sehingga perlu penanganan yang serius. Terlebih lagi bagi Negara Sedang Berkembang (NSB) yang mempunyai beberapa permasalahan seperti ketimpangan pendapatan, inflasi dan pengangguran yang nantinya berdampak pada rendahnya pendapatan sehingga menimbulkan kemiskinan.

Di Indonesia permasalahan kemiskinan, kesejahteraan dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi isu penting sehingga menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah dan seluruh elemen. Meskipun kemiskinan menjadi isu terbesar bagi pemerintah, pemerintah selalu berupaya melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan juga telah dilakukan oleh pemerintah. Berbagai program yang telah dilakukan seperti diluncurkannya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun program tersebut belum dapat sepenuhnya mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.

Pasalnya jumlah kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara Australia yang hanya 22 juta jiwa (tribunnews.com). Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) pada Bulan September 2017 mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen). Meskipun jumlah tersebut berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Data lain menginformasikan bahwa sekitar

seperempat jumlah penduduk Indonesia (sekitar 65 juta jiwa) yang berada di atas garis kemiskinan nasional (indonesia-investments.com). Hal tersebut menjelaskan masih banyak masyarakat di Indonesia hidup miskin.

Pendidikan menjadi bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat mempengaruhi kemiskinan (Zuhdiyati, 2017). IPM merupakan indeks komprehensif sebagai ciri tingkat pembangunan manusia di daerah atau negara yang diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan dan umur panjang, serta pendapatan (Yakunia RP & Bychkov GA, 2015). IPM menurut BPS ada tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak.

Permasalahan yang perlu disoroti dari IPM yaitu terkait pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Ragnar Nurkse dalam bukunya yang membahas mengenai Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*) mengatakan bahwa kemiskinan itu tidak berpangkal, yaitu permasalahan yang akan bergerak melingkar, saling berkaitan satu sama lain dan tidak ada ujungnya. Dalam teori tersebut Ragnar Nurske juga menggunakan indikator IPM. Menurut Ragnar Nurkse (1953) IPM dapat mempengaruhi kemiskinan.

Salah satu indikator IPM yang digunakan oleh Ragnar Nurske (1953) yaitu pendidikan. Pendidikan adalah pintu masuk utama untuk mengatasi kemiskinan karena melalui pendidikan seseorang akan dapat bersaing di dunia kerja. Terlebih lagi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah berlaku sejak 2015 yang berarti bahwa masyarakat Indonesia harus bersaing dengan tenaga

kerja asing yang sudah mulai masuk di Indonesia. Salah satu cara yang bisa ditempuh yaitu melalui pendidikan.

Tabel 1. Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi dan Partisipasi Sekolah, 2017

Karakteristik Demografi	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
Total	6,93	25,48	67,59
Jenis Kelamin			
Laki-laki	5,65	25,81	68,54
Perempuan	8,21	25,15	66,64
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	5,36	26,01	68,63
Perdesaan	8,69	24,88	66,42
Kelompok Umur			
5	97,47	2,53	0,00
6	55,11	44,85	0,04
7 – 12	0,68	99,14	0,18
13 – 15	0,53	95,08	4,38
16 – 18	0,64	71,42	27,94
19 – 24	0,75	24,77	74,48
25+	5,76	0,84	93,39

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017 (data diolah)

Kondisi pendidikan di Indonesia tergolong rendah meskipun sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS (2017) pada Tabel 1, partisipasi penduduk umur 5 tahun yang masih bersekolah sebesar 2,53 persen, umur 6 tahun sebesar 44,85 persen, kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,14 persen, kelompok umur 13-15 tahun sebesar 95,08 persen, kelompok umur 16-18 tahun sebesar 71,42 persen, dan pada kelompok umur 19-24 tahun sebesar 24,77 persen. Persentase terbesar adalah pada kelompok umur 7-12 dan 13-15 tahun mengingat kelompok umur tersebut adalah kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama. Menariknya, terdapat hampir separuh penduduk umur 6 tahun dengan status masih bersekolah. Hal tersebut menandakan bahwa

banyaknya penduduk umur 6 tahun yang mengikuti pendidikan SD/sederajat, dimana rentang umur 6 sampai 7 tahun sudah bisa masuk SD. Sementara itu, partisipasi sekolah kelompok umur pendidikan tinggi 19-24 tahun menurun hanya 24,77 persen. Hal itu menunjukkan bahwa masih rendahnya penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi.

Berdasarkan data Kemdikbud, pertumbuhan jumlah peserta didik tertinggi adalah pada jenjang menengah (SMA dan SMK). Sementara itu, persentase pertumbuhan peserta didik jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) relatif kecil bahkan menurun. Peningkatan atau penurunan jumlah peserta didik merupakan salah satu faktor pertumbuhan jumlah sekolah.

Tabel 2. Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi, Tahun ajaran 2015/2016 dan 2016/2017

Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas TA 2015/2016			Kondisi Ruang Kelas TA 2016/2017		
	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat/ Total	Baik	Rusak Ringan/ Sedang	Rusak Berat/ Total
SD	23,85	65,21	10,94	25,74	63,95	10,31
SMP	26,97	64,65	8,39	28,73	62,57	8,71
SMA	47,35	47,98	4,67	45,66	50,00	4,34
SMK	45,68	50,44	3,87	45,66	50,77	3,57

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Selain dilihat dari angka partisipasi sekolah, pendidikan yang baik harus didorong dengan fasilitas yang memadai sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan lancar. Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Salah satu prasarana pendidikan yaitu ruang kelas.

tabel 2 menunjukkan persentase ruang kelas dengan kondisi baik di SD dan SMP masing-masing naik sekitar 2 persen. Sebaliknya, pada jenjang SMA persentase ruang kelas dengan kondisi baik mengalami penurunan. Sedangkan pada jenjang SMK relatif tidak berubah mengingat angka cenderung stagnan dalam dua tahun terakhir.

Selain ruang kelas yang baik, yang perlu diperhatikan adalah jumlah rombel dalam suatu sekolah yang diwujudkan kedalam suatu rasio. Angka rasio lebih dari satu menunjukkan rombel yang lebih banyak dari ruang kelas yang tersedia. Kekurangan ruang kelas biasanya diatasi dengan penggunaan ruang kelas secara bergantian. Data Kemdikbud memperlihatkan kekurangan ruang kelas yang paling besar pada jenjang SMK. Sebagai gambaran, dari 116 rombongan belajar hanya tersedia 100 ruang kelas. Artinya, terdapat 16 rombongan belajar yang tidak memiliki kelas. Sedikitnya 32 rombongan belajar harus menggunakan ruang kelas secara bergilir/bergantian.

British Medical Association melalui survey Diet Penghasilan Rendah dan Nutrisi (2017) menunjukkan bahwa seseorang yang tidak menempuh pendidikan akan lebih banyak makan makanan padat energi dari pada pemenuhan kebutuhan buah dan sayur. Hal tersebut berbeda dengan seseorang yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Hasil lain dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa seseorang dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dikaitkan dengan berkurangnya aktivitas merokok dan meningkatnya aktivitas fisik.

Selain pendidikan, indikator IPM lainnya yaitu masalah kesehatan. Kesehatan sebagai dampak dari modal manusia (Hafner & Mayer, 2013). Kesehatan erat kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan sehari hari. Jika kesehatan menurun maka aktivitas sehari-hari juga tidak dapat maksimal yang nantinya mengakibatkan produktivitas menurun. Menurunnya produktivitas berdampak pada penurunan pendapatan. Turunnya pendapatan dapat memicu bertambahnya kemiskinan jika dalam jangka waktu lama.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakekesnas) tahun 2018 menyebutkan bahwa penurunan permasalahan kesehatan yang sedang digalakkan terkait dengan percepatan eliminasi tuberculosis (TBC), penurunan *stunting* dan peningkatan cakupan serta mutu imunisasi. Terkait TBC, Indonesia menempati posisi kedua dengan beban TBC tertinggi di dunia. Tren insiden kasus TBC di Indonesia tidak pernah menurun, masih banyak kasus yang belum terjangkau dan terdeteksi, kalaupun terdeteksi dan telah diobati tetapi belum dilaporkan. Upaya pengurangan terjadinya TBC yang telah dilakukan pemerintah berupa peningkatan deteksi dengan pendekatan keluarga, edukasi TBC pada masyarakat dan perbaikan perumahan.

Terkait *stunting* merupakan permasalahan yang diakibatkan dari faktor ibu yang kurang nutrisi pada masa remaja, masa kehamilan, menyusui, dan infeksi pada ibu. Faktor lain terkait *stunting* berupa kualitas pangan, rendahnya asupan vitamin dan mineral, buruknya keragaman pangan serta faktor lain berupa ekonomi, pendidikan, infrastruktur, budaya dan

lingkungan. Departemen Kesehatan (Depkes) menyebutkan bahwa WHO membatasi masalah *stunting* sebesar 20%. Sementara itu, berdasarkan Pemantauan Status Gizi 2015-2016 prevalensi balita *stunting* di Indonesia dari 34 provinsi hanya ada 2 provinsi yang berada di bawah batasan WHO. Oleh karena itu permasalahan *stunting* tersebut yang telah menjadi perhatian Presiden RI ke-7 yaitu Ir. Joko Widodo sehingga usaha untuk mengurangi permasalahan tersebut diantaranya intervensi gizi pada remaja dan ibu hamil, peningkatan ekonomi keluarga melalui program keluarga harapan, program akses air bersih dan sanitasi, edukasi gizi, akses pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Permasalahan imunisasi terkait dengan difteri dan campak yang sedang terjadi sehingga pemerintah perlu mengkaji ulang sejauh mana program imunisasi yang telah dilakukan. Namun, cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan. Data Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, cakupan imunisasi secara nasional sebesar 86,5% pada tahun 2015, sebesar 91,6% pada tahun 2016 dan sebesar 92,4% pada tahun 2017.

Di era kemajuan teknologi sekarang ini, sangat memungkinkan untuk mendapatkan informasi melalui kecanggihan teknologi mengenai pengobatan berbagai penyakit. Tidak menjadi halangan bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan berbagai macam cara pengobatan diluar negeri. Hal itu, dikarenakan mudahnya informasi yang didapatkan dari internet saat ini. Contohnya saja melalui media-media sosial seperti instragam, facebook,

twitter dan lain sebagainya. Maka dari itu masyarakat dituntut untuk melek terhadap kemajuan teknologi. salah satunya dapat menggunakan internet.

Bagian dari internet yang paling berpengaruh salah satunya adalah kecepatan. Indonesia yang terdiri lebih dari 13 ribu pulau yang tersebar pada area seluas 1,9 juta kilo meter persegi dan terlebih lagi dengan medan yang sulit dijangkau mengakibatkan sulitnya dalam hal akses untuk memberikan layanan internet secara menyeluruh (Shani, 2018). Terlebih lagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terpisah oleh lautan membuat hal tersebut menjadi semakin buruk (rendahnya kecepatan internet).

Lebih lanjut menurut Shani (2018), selain faktor geografis yang mempengaruhi kualitas akses internet yaitu banyaknya penyedia layanan internet (*provider*) sehingga *bandwidth*-nya akan semakin terbagi yang akan menyebabkan tiap *provider* mendapatkan sedikit bagian yang berimbang pada rendahnya kecepatan akses internet. Selain itu, masalah lain terkait koneksi internet lambat di Indonesia ialah penyedia layanan telekomunikasi masih mengandalkan jaringan nirkabel yaitu sistem seluler dan satelit. Janis ini lebih rendah dalam hal kualitas dan kecepatan menyampaian sinyal dibandingkan kabel serat fiber.

Permasalahan lain terkait koneksi internet yang membutuhkan infrastruktur yang memadai. Mulai dari kabel hingga tower dengan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu jumlah penduduk Indonesia masuk lima besar terbanyak di dunia dan pengguna internetnya tinggi. Selain itu tanpa

diimbangi dengan infrastruktur yang memadai maka peningkatan kualitas internet juga tidak maksimal. (Shalim, 2018).

Salah satu penyebab infrastruktur yang tidak memadai salah satunya adalah faktor geografis Indonesia yang terkait dengan akses jalan dan jarak yang cukup jauh antar pulau. Banyak lokasi di Indonesia yang masih minim infrastruktur yang memadai sehingga untuk membangun fasilitas internet membutuhkan biaya yang lebih tinggi lagi. Hal ini yang akan membuat akses internet akan berbeda disetiap daerah karena biaya pembangunan dan pemeliharaannya juga berbeda.

Berdasarkan data eMarketer, Indonesia menempati urutan keenam sebagai pengguna internet dari 25 negara pada tahun 2013-2018. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti arus globalisasi sehingga mau tidak mau harus berani bersaing dan siap menghadapi kemajuan teknologi. Pengguna internet yang berada di atas Indonesia yaitu negara Tiongkok, Amerika Serikat, India, Bazil dan Jepang. Namun dengan penggunaan internet yang tertinggi Tiongkok berkontribusi lebih dari 70 persen dalam mengurangi kemiskinan di dunia (Weiping, 2018: 3). Bahkan pada tahun 2017 lebih dari 700 juta jiwa dapat lepas dari jerat garis kemiskinan dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 milyar jiwa (worldmeter.com) atau setara dengan 50 persen penduduk Tiongkok terbebas dari kemiskinan. Berbeda dengan Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa tahun 2017 namun angka kemiskinan pada Bulan September 2017 mencapai 26,58 juta jiwa (10,12 persen). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pada

Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta jiwa (10,64 persen) atau telah berkurang 10,12 persen (BPS). Oleh karena itu jika dilihat dari persentase, pengurangan angka kemiskinan di Negara Tiongkok lebih besar dibandingkan dengan pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.

Masalah faktor geografis Indonesia terkait dengan akses jalan dan jarak yang cukup jauh antar pulau sebenarnya sudah dapat ditangani dengan banyaknya kendaraan atau alat transportasi. Bahkan kepemilikan transportasi dapat dilakukan dengan mudah yaitu banyaknya kredit motor biaya murah sehingga tidak sedikit yang memiliki kendaraan. Hanya saja dengan bertambahnya kendaraan, tentu akan meningkatkan kemacetan. Namun, sebenarnya sejak dulu transportasi atau angkutan umum sudah tersedia. Bahkan di era sekarang maraknya ojek *online* (ojol)

Indonesia yang dihuni ratusan ribu penduduk yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Terlebih lagi di Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat di Indonesia (transportationissuesdaily.com). Semakin padat penduduk permasalahan transportasi juga semakin parah (kemacetan) yang tidak diimbangi dengan sistem transportasi yang tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut yang menjadi pekerjaan rumah pagi pemerintah untuk memberikan solusi terkait masalah kemacetan yang menimbulkan berbagai permasalahan yaitu kehilangan banyak waktu, polusi udara dan kesehatan yang tidak baik (transportationissuesdaily.com). Oleh karena itu perlu adanya pengkajian ulang mengenai banyaknya transportasi yang sudah memadai namun kemiskinan masih melanda Indonesia.

Selain modal fisik terdapat pula modal sosial yang perlu disoroti sebagai permasalahan di Indonesia yaitu pertisipasi kegiatan sosial dan ketaatan terhadap agama yang dianut. Partisipasi kegiatan sosial masyarakat meliputi kegiatan sosial, keaktifan berorganisasi, arisan dll. Melalui kegiatan sosial seharusnya masyarakat harus mampu mengembangkan dirinya agar dapat bermanfaat untuk sekitar.

Tata (2015) mengemukakan bahwa banyak di program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kurang optimal melibatkan masyarakat dalam perencanaan sampai evaluasi pembangunan di desa, sehingga muncul kesenjangan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kepedulian masyarakat sendiri yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat. Secara lebih lanjut Tata (2015) menyebutkan rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan tetapi tanpa disadari peran pemerintah dalam wujud regulasi yang kurang memberikan keleluasaan bagi masyarakat secara optimal yang mana kondisi tersebut tercermin dari pelaksanaan Program P2MD (Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Modal sosial yang lainnya yaitu berkaitan dengan ketaatan dalam beribadah. Ketaatan beribadah berkaitan dengan semakin dekatnya seseorang dengan Tuhan-nya dan ketaatan terhadap agamanya (norma agama). Kusuma (2015:9) menyatakan bahwa norma agama merupakan suatu keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu mengenai perintah dan larangan Tuhan (Allah

SWT) baik yang berhubungan secara gaib, antar individu, individu dengan lingkungannya untuk mencapai tatanan kehidupan yang baik dan jika melanggar akan ada sanksinya bukan hanya didunia akan tetapi juga diakhirat.

Hal yang berkaitan dengan penyimpangan norma agama yaitu merebaknya penyakit sosial seperti korupsi, pemakaian obat terlarang, seks bebas dan perilaku menyimpang lainnya sebagai perbuatan yang melanggar moral, etika dan kepatuhan (Resmini, 2010). Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai moral kepatuhan agama sudah mengalami pergeseran. Segala jenis penyimpangan tersebut sebagai masalah sosial yang tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional) bahkan internasional karena kualitasnya dipandang lebih serius dibandingkan pada masa sebelumnya (Rusmini, 2015).

Berdasarkan berbagai permasalahan penulis juga menggunakan penelitian Sidu (2007) untuk membahas mengenai pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan dapat diartikan sebagai bentuk pengurangan kemiskinan. Melalui pemberdayaan dapat mendorong masyarakat yang lemah sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan potensi. Selain itu masyarakat dapat memilih alternatif pemecahan masalah. Sidu (2007: 46) menyebutkan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara peningkatan modal fisik, modal manusia (*human capital*) dan modal sosial. Modal fisik terdiri dari sarana dan prasarana produksi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi dan komunikasi. Modal

manusia terdiri dari tingkat pendidikan, kesehatan dan interaksi antar sesama sedangkan modal sosial terdiri dari jaringan soial dan kesepakatan dalam organisasi.

Mengacu pada disertasi tersebut, penulis mengambil beberapa faktor yang terkait dengan program pemberdayaan sebagai alternatif untuk mengurangi kemiskinan. Beberapa faktor yang digunakan akan dikaitkan dengan teori mengenai kemiskinan oleh Nurkse (1953) tentang Lingkaran Setan Kemiskinan dan Sharp et al (1996) serta teori dari Sen (1981) mengenai salah satu faktor yang dapat mengukur kemiskinan yaitu terkait kesejahteraan. Faktor yang diambil dari modal fisik pada penelitian Sidu yaitu terkait dengan teknologi yang mendukung kesejahteraan. Faktor tersebut yaitu transportasi dalam hal ini adalah transportasi dan internet. Tanpa adanya transportasi yang memadai, akses dalam melakukan kegiatan sehari-hari menjadi terganggu. Misalnya saja jika ingin menuju ke puskesmas, pasar, sekolah dan fasilitas umum yang lain.

Sidu (2007) menggunakan modal manusia untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Modal manusia yang digunakan terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dalam hal ini yaitu tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh dan/atau yang ditamatkan. Sedangkan untuk mengukur kesehatan menggunakan frekuensi sakit yang diderita oleh masyarakat. Untuk modal sosial menggunakan proksi yang sama dengan penelitian Sidu (2007) yaitu tingkat kepatuhan terhadap norma (agama) dan

tingkat keterlibatan dalam aktivitas organisasi sosial (frekuensi mengikuti kegiatan organisasi sosial masyarakat).

Namun yang berbeda dengan penelitian Sidu bahwa penulis menggunakan data IFLS5 yaitu tahun 2014. Data tersebut diperoleh dari RAND Corporation SurveyMeter dan menggunakan sampel masyarakat Indonesia yang tersebar di 24 provinsi sedangkan Sidu hanya melakukan penelitian pada salah satu provinsi di Indonesia. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Akses Internet, Kepemilikan Kendaraan, Ketaatan Norma Agama, dan Partisipasi Kegiatan Masyarakat terhadap Kemiskinan di Indonesia di Indonesia dengan menggunakan teori Ragnar Nurkse, Sharp et al, Amartya Sen dan modifikasi dengan model Sidu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditentukan identifikasi masalah yaitu:

1. Kemiskinan menjadi fokus permasalahan di negara maju dan negara berkembang.
2. Kemiskinan dan kekurangan pekerjaan menjadi isu penting di Indonesia yang harus segera ditangani oleh berbagai pihak.
3. Berbagai program yang belum sepenuhnya mengatasi kemiskinan.
4. Tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia dibandingkan dengan negara Australia.

5. Kondisi pendidikan di Indonesia tergolong rendah meskipun sedikit demi sedikit mengalami peningkatan.
6. Penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi hanya 24,77 persen.
7. Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yang belum signifikan karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan seperti kondisi ruang kelas pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK rata-rata diatas 50%.
8. Banyaknya permasalahan kesehatan seperti TBC, *stunting*, dan imunisasi yang yang belum terjangkau dan terdeteksi.
9. Rendahnya kecepatan akses internet yang disebabkan oleh banyaknya penyedia layanan internet (*provider*) sehingga *bandwidth*-nya akan semakin terbagi yang akan menyebabkan tiap *provider* mendapatkan sedikit bagian.
10. Belum tersedianya infrastruktur yang memadai sehingga peningkatan kualitas internet juga tidak maksimal.
11. Biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi serta akses jalan dan jarak yang cukup jauh antar pulau membuat akses internet akan berbeda disetiap daerah karena biaya pembangunan dan pemeliharaannya juga berbeda.
12. Peningkatan penggunaan internet namun angka pengurangan kemiskinan berjalan melambat.

13. Program pembangunan kurang optimal baik dari segi perencanaan hingga evaluasi sehingga menyebabkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat.
14. Kesenjangan mengakibatkan rendahnya kepedulian masyarakat sendiri yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat.
15. Merebaknya penyakit sosial seperti korupsi, pemakaian obat terlarang, seks bebas dan perilaku menyimpang lainnya sebagai perbuatan yang melanggar moral, etika dan kepatuhan.
16. Nilai moral kepatuhan agama sudah mengalami pergeseran.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka yang dijadikan fokus penelitian ini terletak pada rendahnya pendapatan di Indonesia sehingga sebagai proksi dari kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian memfokuskan faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu pendidikan, kesehatan, akses intrenet, kepemilikan kendaraan, ketaatan norma agama dan partisipasi kegiatan masyarakat. Selain itu mangacu pada disertasi Sidu (2014) tentang pemberdayaan masyarakat yang mengarah kepada kesejahteraan (tingkat pendapatan) serta menggunakan teori dasar lingkaran setan kemiskinan oleh Ragnar Nurkse dan Sharp et al.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh akses internet terhadap kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan kendaraan terhadap kemiskinan di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh ketaatan norma agama terhadap kemiskinan di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh partisipasi kegiatan masyarakat terhadap kemiskinan di Indonesia?
7. Bagaimana pengaruh pendidikan, kesehatan, akses internet, kepemilikan kendaraan, ketaatan norma agama, dan partisipasi kegiatan masyarakat secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui:

1. Pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Pengaruh akses internet terhadap kemiskinan di Indonesia.
4. Pengaruh kepemilikan kendaraan terhadap kemiskinan di Indonesia.
5. Pengaruh ketaatan norma agama terhadap kemiskinan di Indonesia.

6. Pengaruh partisipasi kegiatan masyarakat terhadap kemiskinan di Indonesia.
7. Pengaruh pendidikan, kesehatan, askes internet, kepemilikan kendaraan, ketaatan norma agama, dan partisipasi kegiatan masyarakat secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Indonesia.

F. Manfaat Peneltian

1. Manfaat Teoritis

Sumber informasi bagi penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pendidikan, kesehatan, internet, kendaraan, ketaatan norma agama dan partisipasi kegiatan sosial yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penentu kebijakan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan bahwa faktor modal manusia seperti pendidikan dan kesehatan perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b. Bagi akademisi dan peneliti dapat menambah pengetahuan dan sebagai acuan penelitian lanjutan terkait permasalahan kesejahteraan di Indonesia.